

Impelementasi Program Kampung Kreatif Produktif dalam Memberdayakan UMKM Perempuan Kota Surabaya

Stefanus Sakti Raditya Nugraha¹, Nadia Inayatul Islamiyah², Nur Aliyah Dian Wulan Hadi³, Diana Hertati⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

E-mail: 23041010121@student.upnjatim.ac.id¹, 23041010113@student.upnjatim.ac.id²,
23041010126@student.upnjatim.ac.id³, diana.adne2025@gmail.com⁴

Article History:

Received: 06 Juni 2026

Revised: 02 September 2026

Accepted: 09 September 2026

Keywords: UMKM

Perempuan, Pemberdayaan,
Implementasi Kebijakan.

Abstrak: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, dengan mayoritas pelaku usaha dikelola oleh perempuan. Namun, keterbatasan akses modal, sarana, serta pengetahuan manajerial masih menjadi hambatan utama. Pemerintah Kota Surabaya melalui program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KAS-RPA) menghadirkan sub-program Kampung Kreatif Produktif sebagai strategi pemberdayaan UMKM perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi program tersebut di RW 07 Kelurahan Gunung Anyar dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang menekankan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi formal dari pemerintah kota masih terbatas, namun diperkuat oleh inisiatif lokal melalui media digital seperti WhatsApp. Sumber daya yang tersedia lebih banyak berupa fasilitas event bazar dan dukungan sosial, sementara pelatihan masih minim. Disposisi pelaksana, khususnya RW dan PKK, berperan aktif dalam mendukung UMKM perempuan melalui kegiatan promosi dan penyediaan ruang partisipasi. Kesimpulannya, meskipun terdapat keterbatasan sumber daya dan sosialisasi formal, inisiatif lokal mampu memperkuat implementasi program sehingga UMKM perempuan tetap berkembang dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

PENDAHULUAN

Salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan dalam perekonomian nasional adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Peran strategis UMKM dalam menopang

perekonomian Indonesia tercermin dari kontribusinya yang berhasil menyumbang sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, kemampuannya menyerap hampir 97% tenaga kerja, dan jumlahnya yang hingga kini telah melampaui 64 juta unit usaha (Limanseto, 2025). Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap dalam struktur ekonomi nasional, tetapi telah menjadi pondasi utama dalam menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bagaimana UMKM mampu mengadopsi teknologi serta berbagai inovasi baru, dan bagaimana hal tersebut berdampak terhadap peningkatan efisiensi pasar (Dwifanty et al., 2025). Dengan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi, UMKM mampu menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang. Menjaga eksistensi UMKM saja tidaklah cukup mengingat perannya yang begitu krusial, diperlukan serangkaian strategi terstruktur agar sektor ini mampu menjadi mesin penggerak utama.

Merujuk pada data OJK, sektor UMKM nasional yang dikelola oleh perempuan mencapai 64,5 persen dari 65,5 juta keseluruhan total UMKM, dengan jumlah wirausaha perempuan yang mencapai kurang lebih 37 juta orang (Komdigi, 2025). Hal ini menunjukkan pelaksana UMKM di Indonesia yang berperan penting dalam mendukung perekonomian negara mayoritas dilakukan oleh perempuan. Meskipun memiliki potensi yang besar, UMKM yang dikelola oleh sebagian perempuan masih menghadapi berbagai tantangan. Keterbatasan akses terhadap modal usaha, sarana dan prasarana sering menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha mereka. Kurangnya pengetahuan mengenai manajemen usaha, pemasaran digital, serta inovasi produk di tengah perkembangan teknologi yang pesat juga menjadi kendala yang signifikan. Di sisi lain, faktor sosial dan budaya, seperti peran ganda perempuan dalam rumah tangga, turut mempengaruhi produktivitas usaha yang dijalankan. Kondisi ini diperkuat oleh temuan Munthe, Yarham, dan Siregar (2023) dalam (Firmansyah et al., 2025) yang menyoroti bahwa hambatan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi semakin kompleks akibat pengaruh sistem patriarki dan stereotip sosial yang cenderung memarginalkan posisi perempuan dalam aktivitas ekonomi. Situasi ini menunjukkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh sebagian perempuan pelaku UMKM tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh.

Komitmen Pemerintah Kota dalam mewujudkan kesetaraan gender diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 Walikota Surabaya (2019) yang menjadi landasan normatif dalam pelaksanaan pembangunan responsif gender di Surabaya. Regulasi ini menegaskan bahwa pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi yang diintegrasikan ke dalam seluruh tahapan pembangunan. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menjamin kesetaraan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program-program berbasis masyarakat, termasuk Program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KASRPPA), yang dilaksanakan di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya.

Program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KASRPPA) pada mulanya bernama Kampunge Arek Suroboyo (KAS) berfokus pada bidang pendidikan, yang berjalan sejak tahun 2015. Seiring berjalannya waktu, program KAS berganti nama menjadi Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KASRPPA), hingga tahun 2025 program KASRPPA telah dilaksanakan secara bertahap di seluruh Kota Surabaya, program KASRPPA bertujuan untuk memberdayakan perempuan DP3APPKB Surabaya (2025). Program KASRPPA telah dijalankan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa perempuan harus

diberdayakan. Program tersebut memiliki beberapa indikator penilaian kampung yang mencerminkan kondisi pemberdayaan perempuan dan peduli anak di lingkungan masyarakat.

Tabel. 1 Indikator Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Peduli Anak

No.	Kampung	Indikator
1.	Kampung Belajar	Lingkungan kampung memberikan ruang belajar bagi perempuan dan anak.
2.	Kampung Asuh	Lingkungan kampung dapat mengurangi risiko dan penanganan krisis keluarga.
3.	Kampung Sehat	Lingkungan kampung dapat memastikan tidak adanya narkoba, asap rokok, dan pernikahan dini.
4.	Kampung Aman	Lingkungan kampung dapat memberikan rasa aman kepada perempuan dan anak.
5.	Kampung Kreatif Produktif	Lingkungan kampung memastikan bahwa perempuan dan anak memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan ekonomi serta sosial.

Sumber: Dokumen DP3APPKB Surabaya, 2025

Berdasarkan tabel 1.1 indikator Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KASRPPA), terdapat lima indikator kampung yang menjadi dasar dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi perempuan dan anak, yaitu Kampung Belajar berfokus pada penyediaan ruang belajar bagi perempuan dan anak, Kampung Asuh menekankan pada pengurangan risiko dan penanganan permasalahan keluarga, Kampung Sehat bertujuan menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba, asap rokok, dan pernikahan dini, serta Kampung Aman yang memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak. Sementara itu, Kampung Kreatif Produktif menjadi indikator yang menekankan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memastikan perempuan dan anak memiliki kesempatan yang sama dalam kegiatan ekonomi. Indikator ini menjadi fokus dalam penelitian ini karena berperan dalam mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan produktif serta mendukung peningkatan kesejahteraan perempuan di tingkat kampung.

Kampung Kreatif Produktif merupakan salah satu program yang berjalan pada Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Kampung Kreatif Produktif memiliki fokus untuk memberikan fasilitas bagi kelompok UMKM perempuan di tingkat kampung, misalnya melalui penyediaan ruang kolektif sebagai sarana pemasaran produk, yang berfungsi sebagai langkah strategis dalam meningkatkan visibilitas dan daya saing usaha. Selain itu, terdapat usaha untuk meningkatkan kemampuan perempuan melalui penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan

serta pameran produk UMKM perempuan secara periodik guna meningkatkan kapasitas pelaku usaha, baik dalam aspek produksi, manajerial, maupun pemasaran DP3APPKB Surabaya (2025). Dengan adanya upaya tersebut, diharapkan UMKM perempuan tidak hanya memiliki dampak terhadap ekonomi, tetapi juga mampu berkembang secara berkelanjutan serta memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rumah tangga dan ekonomi lokal.

Penelitian (Aji et al., 2024) menyoroti strategi pemberdayaan masyarakat melalui Program KAS-RPA dengan menggunakan model Hunger dan Wheelen (2003) yang mencakup pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi; hasilnya menunjukkan bahwa KAS-RPA berfungsi sebagai strategi preventif dan edukatif untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sekaligus meningkatkan kualitas hidup melalui lima pilar kampung. Sementara itu, penelitian (Rohmah & Hamidah, 2025) menggunakan model Miles dan Huberman (1994) dengan tahapan penyadaran, penguatan kapasitas, dan pendayaan dalam pembentukan Kampung Bebas Asap Rokok di RW 09 Darmo Surabaya; hasilnya berhasil meningkatkan pemahaman warga tentang bahaya rokok, membentuk aturan kampung bebas asap rokok, serta menciptakan norma sosial baru yang mendukung hidup sehat. Adapun penelitian (Diansiwi & Tukiman, 2025) mengacu pada teori Kabeer (2001) tentang lima unsur pemberdayaan kesejahteraan, akses, konsientisasi, partisipasi, dan kesetaraan kontrol dan menemukan bahwa perempuan di RW 05 aktif dalam UMKM, pendidikan komunitas, kesehatan, serta forum sosial seperti PKK dan PUSPAGA, sehingga program KAS-RPA mendukung perempuan untuk lebih mandiri, kreatif, dan berdaya dalam aspek ekonomi, sosial, dan politik. Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian yang diangkat oleh peneliti saat ini akan menyoroti pemberdayaan UMKM perempuan dalam sub-program Kampung Kreatif-Produktif dengan fokus pada kesenjangan antara tujuan program dan realitas implementasi di lapangan.

Program KAS-RPA Kota Surabaya memiliki lima kategori kampung, namun penelitian ini memilih fokus pada Kampung Kreatif Produktif karena paling relevan dengan tema pemberdayaan perempuan melalui kegiatan ekonomi produktif. Kampung ini menekankan penguatan UMKM, pelatihan keterampilan, pemasaran produk, serta kapasitas wirausaha perempuan. Latar belakang penelitian berangkat dari kondisi sosial di RW 07 Kelurahan Gunung Anyar, Surabaya, yang menunjukkan keterlibatan aktif warga dalam forum musyawarah, kegiatan sosial, dan dukungan nyata terhadap UMKM perempuan melalui penyediaan fasilitas usaha. Dukungan ini memperlihatkan bagaimana kebijakan lokal dan modal sosial berjalan beriringan dalam mendorong kemandirian ekonomi. Selain itu, menurut Bapak Tony selaku Pembina KAS-RPA Tahun 2025, RW 07 Kelurahan Gunung Anyar dinilai cukup aktif dalam memberdayakan perempuan pelaku UMKM melalui berbagai kegiatan peningkatan keterampilan dan kreativitas. Hal ini menjadikan RW 07 Kelurahan Gunung Anyar menjadi lokasi penelitian yang tepat untuk melihat bagaimana program Kampung Kreatif Produktif berperan dalam mendukung kesejahteraan keluarga dan pembangunan ekonomi di tingkat masyarakat.

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III (1980) sebagai kerangka analisis utama. George Edward III memandang implementasi sebagai sebuah mekanisme yang menuntut adanya keterpaduan antara aktor, lembaga, dan masyarakat yang terlibat. Tanpa adanya proses implementasi yang baik, kebijakan hanya akan menjadi wacana atau rencana tanpa dampak nyata. Oleh karena itu, teori ini memberikan kerangka konseptual untuk memahami bahwa kebijakan publik bukan sekadar produk hukum atau regulasi, melainkan sebuah proses yang harus dijalankan secara konsisten agar dapat menghasilkan perubahan sosial, ekonomi, maupun politik

sesuai dengan tujuan awal. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator penting, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, serta struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada bagaimana tujuan, standar, dan prosedur kebijakan disampaikan kepada setiap individu pelaksana kebijakan. Informasi tersebut harus jelas, rinci, dan tidak menimbulkan ambiguitas agar mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat.

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya yang cukup agar dapat berjalan secara optimal. Komponen sumber daya tersebut meliputi jumlah dan kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan informasi yang relevan, serta kewenangan yang jelas dalam pelaksanaan tugas.

3. Disposisi atau sikap pelaksana

Sikap atau disposisi pelaksana merupakan faktor yang mempengaruhi sejauh mana kebijakan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksana yang memiliki pemahaman dan kesesuaian sikap terhadap kebijakan akan lebih mudah menjalankannya dengan baik, namun perbedaan pandangan dengan pembuat kebijakan dapat menimbulkan hambatan dalam implementasi.

4. Struktur Birokrasi

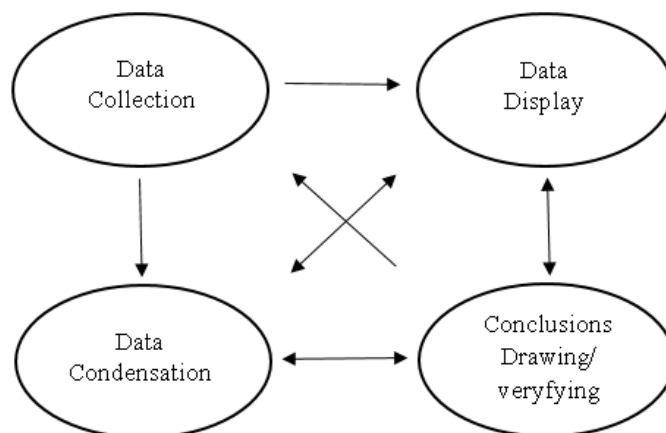
Struktur birokrasi merupakan pola hubungan, aturan, dan karakteristik yang berlangsung secara berulang dalam organisasi pelaksana, yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Struktur yang jelas akan membantu pembagian tugas, kewenangan, serta tanggung jawab antar unit pelaksana.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus untuk memahami secara mendalam implementasi Program Kampung Kreatif Produktif dalam pemberdayaan UMKM perempuan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, serta persepsi para pelaku yang terlibat dalam program tersebut. Data yang digunakan berupa informasi non-numerik yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini berupaya menggambarkan realitas sosial yang terjadi secara utuh sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, pendekatan deskriptif kualitatif dinilai paling relevan untuk menjelaskan fenomena implementasi program secara komprehensif.

Fokus penelitian diarahkan pada implementasi Program Kampung Kreatif Produktif sebagai bagian dari Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KAS-RPA) dalam pemberdayaan UMKM perempuan. Analisis penelitian menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian juga mengkaji peran program dalam meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi perempuan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman. Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai dilaksanakan. Menurut teori Miles dan Huberman dalam (Saleh, 2023), analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan utama, meliputi kondensasi data, display data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, serta diinterpretasikan untuk menemukan pola dan tema penelitian. Melalui teknik analisis tersebut, peneliti dapat menghasilkan

temuan yang sistematis, mendalam, dan sesuai dengan fenomena yang diteliti.



Gambar 1. 1 Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana

Sumber: Diadaptasi dari Miles, Huberman, dan Saldana dalam (Saleh, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan program Kampung Kreatif Produktif untuk mendukung UMKM perempuan. Penelitian difokuskan di RW 07 Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, karena wilayah ini dinilai aktif dalam pemberdayaan UMKM. Proses penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi dari berbagai pihak, termasuk dinas terkait, RW, Ibu PKK, serta pelaku UMKM. Tujuan penelitian adalah menganalisis implementasi pemberdayaan UMKM perempuan berdasarkan teori Edward III, yang mencakup empat aspek utama yaitu komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Hasil wawancara dengan beberapa narasumber menunjukkan adanya variasi dalam cara penyampaian informasi, aktor yang terlibat, serta media yang digunakan. Analisis berikut menguraikan bagaimana komunikasi dijalankan, tantangan yang dihadapi, serta pentingnya komunikasi dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan UMKM perempuan di wilayah tersebut. Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Diki selaku staf bidang Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak DP3APKB Kota Surabaya, menunjukkan bahwa komunikasi program dilakukan melalui sosialisasi resmi yang diselenggarakan pemerintah kota. Pada tahun lalu, pelaksanaan sosialisasi diadakan di Bulan September yang bertujuan untuk memperkenalkan konsep kampung ramah perempuan dan anak, termasuk fasilitasi usaha mikro perempuan. Adanya komunikasi dari level pemerintah berfungsi sebagai payung kebijakan yang memberikan legitimasi sekaligus arah bagi pelaksanaan program di tingkat RW.

Kemudian dengan Bapak Dominikus selaku Ketua RW 07, menjelaskan bahwa komunikasi di tingkat RW masih terbatas dan lebih bersifat individual. Sosialisasi belum dilakukan secara masif karena RW masih dalam tahap pendataan dan pemetaan kebutuhan UMKM. Informasi lebih banyak disampaikan melalui jalur informal, seperti komunikasi antar individu atau melalui grup WhatsApp. Hal ini menandakan bahwa komunikasi di tingkat RW lebih menyesuaikan dengan kebutuhan praktis masyarakat, meskipun belum terstruktur secara sistematis. Selain itu, wawancara dengan Bu Novi selaku Ketua PKK RW 07, menekankan

peran komunikasi berbasis komunitas. Beliau membentuk grup WhatsApp khusus UMKM sebagai wadah promosi dan koordinasi. Informasi mengenai event seperti bazar disampaikan melalui grup tersebut, kemudian diteruskan ke masing-masing RT. Komunikasi yang dilakukan bersifat partisipatif, melibatkan kader PKK dan koordinator UMKM, sehingga informasi lebih cepat menyebar dan langsung menjangkau pelaku UMKM. Inisiatif lokal ini memperkuat komunikasi program melalui media digital sederhana yang dekat dengan masyarakat.

Wawancara yang dilakukan bersama Bu Ririn, salah satu pelaku UMKM, menyampaikan bahwa komunikasi yang diterima pelaku usaha sangat bergantung pada Ketua RW dan grup WhatsApp. Informasi mengenai kegiatan seperti bazar atau dukungan dari kelurahan disampaikan melalui RW, kemudian diperkuat dengan koordinasi di grup WhatsApp. Ririn menilai komunikasi tersebut penting karena membantu menjaga koordinasi dan memastikan pelaku UMKM tidak ketinggalan kesempatan untuk berpartisipasi. Komunikasi yang jelas dan konsisten berperan langsung dalam keberlangsungan usaha UMKM.

Pola komunikasi yang muncul dari keempat narasumber menunjukkan adanya perbedaan antara komunikasi formal dari pemerintah dan komunikasi informal di tingkat RW. Pemerintah kota melalui DP3APPKB menekankan sosialisasi kebijakan secara resmi, sementara RW dan PKK lebih mengandalkan komunikasi berbasis komunitas dengan media digital seperti WhatsApp. Perbedaan ini mencerminkan adanya dualisme komunikasi, yaitu top-down dari pemerintah dan bottom-up dari masyarakat. Pentingnya komunikasi dalam pemberdayaan UMKM terlihat dari bagaimana informasi mampu memfasilitasi partisipasi perempuan. Bu Novi menggunakan komunikasi untuk mengorganisir bazar, sehingga pelaku UMKM memiliki ruang untuk memasarkan produk mereka. Tanpa komunikasi yang efektif, kegiatan seperti bazar tidak akan berjalan lancar karena pelaku UMKM tidak mengetahui jadwal maupun mekanisme partisipasi.

Komunikasi juga berfungsi sebagai sarana pemetaan kebutuhan. Bapak Dominikus menekankan bahwa RW masih dalam tahap pendataan, sehingga komunikasi dilakukan secara terbatas. Namun, proses pendataan itu sendiri merupakan bentuk komunikasi yang penting untuk memahami kebutuhan masyarakat. Dengan adanya komunikasi, RW dapat mengetahui kebutuhan pelaku UMKM, seperti sosialisasi mengenai logo halal dan NIB. Media komunikasi yang digunakan, terutama WhatsApp, terbukti efektif dalam menjangkau masyarakat. Bu Ririn menilai WhatsApp sebagai media yang cepat, jelas, dan mudah diakses. Pemanfaatan teknologi sederhana ini memperkuat komunikasi program, terutama di tingkat lokal. Komunikasi juga berperan dalam membangun rasa kebersamaan dan dukungan antar pengurus. Bu Novi menekankan bahwa antar pengurus saling mendukung dalam menyampaikan informasi dan membantu pelaku UMKM. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun solidaritas sosial.

Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan faktor krusial dalam implementasi Program Kampung Kreatif Produktif di RW 07 Kelurahan Gunung Anyar. Pemerintah kota berperan dalam sosialisasi kebijakan secara formal, sementara RW dan PKK mengembangkan komunikasi berbasis komunitas melalui media digital. Meskipun terdapat keterbatasan dalam sosialisasi formal, inisiatif lokal mampu memperkuat komunikasi sehingga pelaku UMKM tetap terinformasi dan terfasilitasi. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga instrumen pemberdayaan yang memungkinkan perempuan pelaku UMKM untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan kampung.

2. Sumber Daya

Program Kampung Kreatif Produktif di RW 07 Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya merupakan salah satu bentuk inisiatif lokal untuk mendukung pemberdayaan UMKM perempuan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, terlihat bahwa penyediaan sumber daya menjadi aspek penting dalam mendukung keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari wawancara dengan Mas Diki, selaku staf bidang Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak DP3APPKB Kota Surabaya, diketahui bahwa dinas tidak memberikan dana, fasilitas tempat, maupun pelatihan secara langsung. Dukungan yang diberikan lebih berupa materi sosialisasi mengenai peran perempuan dalam UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber daya formal dari pemerintah kota masih terbatas, sehingga peran RW dan PKK menjadi lebih dominan.

Bapak Dominikus selaku Ketua RW 07, menegaskan bahwa kelurahan pernah menyediakan pelatihan, meskipun partisipasi masyarakat rendah. RW juga menyediakan tempat khusus bagi UMKM perempuan saat event besar seperti Ramadhan dan 17 Agustus-an. Sehingga, sumber daya lebih banyak hadir dalam bentuk fasilitas event, bukan dukungan berkelanjutan. Bu Novi selaku Ketua PKK RW 07, menjelaskan bahwa PKK berperan aktif dalam menyediakan wadah pemasaran melalui bazar pada event tertentu. Selain itu, promosi juga dilakukan melalui grup WhatsApp tanpa biaya tambahan. Dukungan ini sangat membantu pelaku UMKM, terutama yang kesulitan memasarkan produk secara mandiri. Bagi pelaku UMKM seperti Bu Ririn, bazar menjadi sumber daya paling nyata yang membantu usaha kuliner mereka. Dengan adanya bazar, produk UMKM lebih dikenal masyarakat dan memiliki peluang pemasaran langsung. Meskipun pelatihan belum banyak diikuti, pengalaman pribadi dan dukungan RW melalui bazar sudah cukup membantu perkembangan usaha. Event bazar tujuh belasan dan Ramadhan, menjadi momen penting bagi UMKM untuk memaksimalkan penjualan. Novi menuturkan bahwa bazar tujuh belasan biasanya berlangsung selama dua hari dan ramai dikunjungi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya berupa event memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan penjualan UMKM. Panitia bazar menyediakan fasilitas seperti tenda, meja, lampu, dan media promosi. Jumlah meja yang disediakan mencapai sekitar 60, meskipun ada pelaku UMKM yang berbagi meja. Fasilitas ini menjadi bentuk nyata dukungan sumber daya yang langsung dirasakan oleh pelaku UMKM.

Dalam beberapa kegiatan, pelaku UMKM dikenakan biaya Rp50.000 untuk sewa meja dan kebersihan. Meskipun sederhana, mekanisme ini menunjukkan adanya swadaya masyarakat dalam mendukung keberlangsungan event. Hal ini juga menegaskan bahwa sumber daya finansial dari pemerintah masih minim, sehingga masyarakat berinisiatif menutup kebutuhan sendiri. Proses mendapatkan bantuan sumber daya dilakukan melalui RW yang mendaftarkan kebutuhan masyarakat, kemudian disampaikan ke kelurahan dan kecamatan. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa RW berfungsi sebagai penghubung utama dalam memastikan kebutuhan UMKM tersampaikan kepada pihak terkait. Selain fasilitas fisik, sumber daya juga hadir dalam bentuk perhatian dan dukungan moral. Bu Ririn menekankan bahwa perhatian RW terhadap UMKM, meskipun sederhana, sudah cukup membantu usaha kecil tetap berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya tidak selalu berupa dana atau pelatihan, tetapi juga dukungan sosial. Sebagian besar narasumber menyebutkan bahwa pelatihan belum banyak diadakan atau belum diikuti oleh pelaku UMKM. Padahal, pelatihan dianggap penting untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan tambahan, terutama bagi mereka yang baru memulai usaha.

Bapak Diki menegaskan bahwa sumber daya sangat penting dalam mewujudkan program Kampung Kreatif Produktif. Tanpa adanya sumber daya, program sulit berjalan. Hal ini

memperlihatkan bahwa keberhasilan pemberdayaan UMKM sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya yang memadai. Selain fasilitas fisik, jaringan sosial melalui PKK dan RW juga menjadi sumber daya penting. Dukungan dari bapak RT yang memesan produk UMKM menggunakan kas RT menunjukkan adanya bentuk sumber daya sosial yang membantu pemasaran produk.

Secara keseluruhan, hasil wawancara menunjukkan bahwa sumber daya dalam program Kampung Kreatif Produktif masih terbatas pada wadah event dan fasilitas sederhana. Dukungan dari dinas relatif minim, sehingga RW, PKK, dan masyarakat berperan besar dalam menyediakan sumber daya. Meskipun terbatas, sumber daya berupa bazar, fasilitas event, dan dukungan sosial terbukti mampu membantu UMKM perempuan di RW 07 Kelurahan Gunung Anyar untuk tetap berkembang dan dikenal masyarakat.

3. Disposisi atau Sikap pelaksana

Disposisi berkaitan dengan komitmen, kepedulian, dukungan, dan respon pelaksana kebijakan dalam menjalankan suatu program. Berdasarkan hasil wawancara dengan pembina Program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KASRPPA) dari DP3APPKB Kota Surabaya, diketahui bahwa pemerintah menunjukkan komitmen dalam mendukung perempuan pelaku UMKM melalui kegiatan sosialisasi kepada pihak RW. Pemerintah berupaya membangun kepedulian pengurus wilayah terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan melalui kegiatan UMKM. Pembina program juga menyampaikan bahwa pihak RW menjadi aktor utama dalam pelaksanaan program, karena lebih memahami kondisi masyarakat di wilayahnya. Dukungan aktif dari pemerintah dilakukan melalui proses penyampaian bantuan dan kebutuhan masyarakat kepada dinas terkait. Bapak Diki, selaku pembina program dari DP3APPKB menambahkan perihal seluruh kebutuhan yang masuk ke DP3APPKB akan didata dan dikomunikasikan kepada instansi terkait untuk diproses lebih lanjut. DP3APPKB sebagai perwakilan pemerintah yang menjalankan program, berusaha menunjukkan sikap responsif terhadap kebutuhan perempuan pelaku UMKM meskipun pelaksanaannya masih dilakukan melalui koordinasi dengan pihak wilayah.

Merujuk pada hasil wawancara dengan Pak Dominikus selaku Ketua RW 07, diketahui bahwa dukungan terhadap perempuan pelaku UMKM dilakukan melalui keterlibatan aktif dari pengurus RW dan PKK. Ketua RW menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan melalui pelatihan, meskipun pelaksanaannya dinilai masih belum tepat sasaran. Selain itu, Ketua RW menjelaskan terkait aktor utama yang menunjukkan komitmen dalam menjalankan program adalah ibu-ibu PKK yang terlibat langsung dalam kegiatan UMKM. Dukungan aktif pelaksana program tercermin dari keberadaan grup UMKM di tingkat RT dan RW yang digunakan untuk membantu komunikasi dan penyebaran informasi kegiatan. Ketua RW menyampaikan dukungannya terhadap perempuan pelaku UMKM dapat dirasakan ketika terdapat kegiatan bazar atau event tertentu. Dukungan promosi turut dilakukan oleh pengurus RW melalui penyebaran informasi produk UMKM kepada masyarakat sekitar melalui grup WhatsApp. Ketua RW juga menegaskan kembali adanya komitmen pelaksana sangat penting dalam keberhasilan program. Seluruh kebutuhan perempuan pelaku UMKM akan diterima dan dikomunikasikan oleh pihak RW kepada dinas terkait.

1. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Novi selaku Ketua PKK RW 07, diketahui bahwa pengurus PKK memiliki peran penting dalam membantu pelaksanaan kegiatan UMKM perempuan di wilayah RW 07. Pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan perempuan pelaku UMKM secara utama menjadi tanggung jawab Ketua PKK RW. Dalam pelaksanaannya, Ketua PKK RW bekerja sama dengan anggota PKK lainnya untuk

menjalankan kegiatan tersebut. Ditemukan juga perbedaan persepsi antara pemerintah kota dan pelaksana di tingkat wilayah terkait dukungan terhadap kegiatan UMKM perempuan. Meskipun demikian, Ketua PKK RW tetap berusaha memberikan dukungan kepada perempuan pelaku UMKM melalui berbagai kegiatan lingkungan. Dukungan aktif tersebut diberikan melalui penyelenggaraan bazar dan event tertentu seperti acara Ramadhan, Kemerdekaan maupun kegiatan PKK. Pengurus wilayah berusaha memberikan ruang partisipasi bagi perempuan pelaku UMKM untuk memasarkan produk usahanya kepada masyarakat.

2. Temuan wawancara menunjukkan bahwa dukungan aktif dari Ketua PKK RW diberikan ketika perempuan pelaku UMKM memiliki kebutuhan atau menyampaikan permintaan tertentu. Selain itu, Ketua PKK RW menyampaikan harapan adanya pelatihan UMKM yang lebih aktif bagi perempuan pelaku UMKM untuk mendukung pengembangan usaha mereka. Selain itu, Ketua PKK RW mengharapkan pelatihan UMKM yang lebih aktif bagi perempuan pelaku UMKM agar kemampuan mereka dapat berkembang. Komitmen Ibu Novi selaku Ketua RW terhadap keberlangsungan UMKM perempuan ditunjukkan kembali melalui kepeduliannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Beliau tidak ragu menunjukkan rasa tanggung jawabnya untuk mendukung perempuan pelaku UMKM agar tetap bersemangat menjalankan usahanya. Ibu Novi juga menyampaikan usahanya bersama pengurus PKK lainnya untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan permintaan perempuan pelaku UMKM.

3. Sementara itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ririn yang merupakan perempuan pelaku UMKM di RW 07 Kelurahan Gunung Anyar, diketahui bahwa pelaksanaan Program Kampung Kreatif Produktif dinilai memberikan dukungan yang cukup baik terhadap kegiatan UMKM perempuan. Perempuan pelaku UMKM merasakan adanya dukungan dari pelaksana program dalam kegiatan usaha yang dijalankan. Selain itu, perempuan pelaku UMKM mengutarakan terdapatnya pengurus khusus di tingkat RT yang membantu pelaksanaan program. Komunikasi dan koordinasi program dilakukan hingga tingkat RT sehingga informasi kegiatan dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Interaksi pelaku UMKM dengan pelaksana program biasanya dilakukan menjelang kegiatan bazar maupun acara UMKM lainnya. Selain komunikasi melalui grup WhatsApp, interaksi langsung juga dilakukan melalui pertemuan di Balai RW untuk koordinasi kegiatan. Perempuan pelaku UMKM menilai bahwa sikap pelaksana program dalam melayani sangat mempengaruhi kenyamanan masyarakat dalam mengikuti kegiatan UMKM. Selain itu, perempuan pelaku UMKM juga menyampaikan bahwa respon pelaksana program terhadap kebutuhan peserta kegiatan sudah cukup baik.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM melibatkan berbagai pihak mulai dari DP3APPKB, RT/RW setempat. Dalam pelaksanaannya, setiap pihak memiliki peran masing-masing agar program dapat berjalan dengan baik dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal. Struktur birokrasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di wilayah RW menunjukkan adanya pembagian tugas dan koordinasi yang cukup jelas antara pihak koordinator UMKM, dan pengurus RW. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pelaksanaan program dilakukan melalui alur koordinasi yang telah ditentukan agar kegiatan dapat berjalan dengan tertib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Diki selaku pegawai DP3APPKB sekaligus PIC program, bahwa birokrasi yang panjang akan menghambat dari pelaksanaan program. Selain itu, koordinasi yang dilakukan oleh antar stakeholder sudah cukup baik. Selain itu, walaupun birokrasi cukup panjang tetapi itu bukanlah sebuah halangan untuk menghambat

koordinasi antar pelaksana. Salah satu informan menjelaskan bahwa sebelum kegiatan berlangsung, para pelaku UMKM akan mendapatkan arahan terkait aturan dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Novi selaku pengurus RW. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ririn selaku pelaku UMKM, prosedur dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM dinilai cukup sederhana dan tidak memberatkan peserta. Menurutnya, pelaku UMKM hanya perlu mengikuti arahan dari pihak RW serta memenuhi kewajiban yang telah ditentukan, seperti pembayaran biaya partisipasi kegiatan bazar. Pengawasan program dilakukan oleh pihak RW bersama panitia pelaksana di masing-masing RT yang bertugas mengatur teknis pelaksanaan kegiatan. Menurut Ibu Ririn, hal tersebut penting karena membuat pelaksanaan program menjadi lebih tertib dan transparan sehingga mengurangi potensi ketidakadilan antar peserta. Selain itu, aturan yang diterapkan juga dianggap jelas dan mudah dijalankan oleh pelaku UMKM.

Dalam pelaksanaannya, struktur birokrasi dianggap membantu proses pelaksanaan program karena adanya pembagian tugas yang jelas antara berbagai pihak, RW, serta PKK. Namun, beberapa informan menyebutkan bahwa masih terdapat kendala ketika informasi tidak tersampaikan secara menyeluruh kepada seluruh peserta. Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam pelaksanaan program telah memiliki alur koordinasi yang jelas antar lembaga. Namun demikian, proses birokrasi yang panjang masih menjadi hambatan dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dengan melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, peneliti kemudian mendeskripsikan hasil analisis lebih dalam mengenai implementasi program kampung kreatif produktif dalam memberdayakan perempuan Kota Surabaya. Peneliti akan menganalisis temuan, data maupun informasi yang diperoleh dari lokasi penelitian dan informan penelitian yang disesuaikan dengan fokus penelitian melalui Edward III yang dibagi menjadi 4 yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Adapun fokus penelitian tersebut dianalisis sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi formal dari pemerintah kota melalui DP3APPKB hadir dalam bentuk sosialisasi resmi di tingkat kelurahan. Sosialisasi ini memberikan arah kebijakan dan legitimasi program, sesuai dengan pandangan Edward III bahwa komunikasi dari pembuat kebijakan harus jelas dan konsisten agar tidak menimbulkan penyimpangan. Namun, keterbatasan intensitas sosialisasi membuat pesan kebijakan belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di tingkat RW, sehingga efektivitas komunikasi formal masih terbatas.

Komunikasi yang berada di tingkat RW lebih bersifat informal dan adaptif. Ketua RW menekankan bahwa komunikasi dilakukan seiring dengan proses pendataan kebutuhan UMKM. Meskipun belum terstruktur, komunikasi ini berfungsi sebagai sarana pemetaan kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka Edward III, komunikasi tidak hanya berarti penyampaian pesan dari atas ke bawah, tetapi juga interaksi timbal balik yang memungkinkan pelaksana memahami kondisi riil di lapangan. Komunikasi yang terjadi di tingkat RW menjadi jembatan antara kebijakan formal dan kebutuhan praktis warga.

Peran PKK RW 07 memperlihatkan dimensi komunikasi berbasis komunitas yang lebih partisipatif. Inisiatif membentuk grup WhatsApp khusus UMKM menjadi contoh bagaimana komunikasi dapat dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi dan promosi usaha. Edward III menekankan bahwa komunikasi yang efektif harus mampu menjangkau pelaksana kebijakan

secara langsung dan jelas. Dalam kasus ini, media digital seperti WhatsApp terbukti efektif mempercepat penyebaran informasi sekaligus membangun rasa kebersamaan antar pelaku UMKM.

Pelaku UMKM perempuan menerima informasi terutama melalui Ketua RW dan grup WhatsApp. Mekanisme ini memastikan mereka tidak ketinggalan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan seperti bazar. Konsistensi komunikasi menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha. Dalam perspektif Edward III, komunikasi yang tidak konsisten dapat menimbulkan distorsi kebijakan. Namun, inisiatif lokal di RW 07 mampu menjaga konsistensi informasi meskipun sosialisasi formal masih terbatas.

Komunikasi berfungsi sebagai sarana membangun solidaritas sosial. Dukungan antar pengurus PKK dan RW dalam menyampaikan informasi menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga emosional. Edward III menekankan pentingnya komunikasi yang membangun kepercayaan antara pembuat kebijakan dan pelaksana. Dalam konteks RW 07, komunikasi berbasis komunitas memperkuat rasa kebersamaan sehingga pelaku UMKM merasa lebih terfasilitasi dan didukung.

Tantangan komunikasi dalam program ini terletak pada dualisme antara komunikasi formal dan informal. Sosialisasi dari pemerintah kota belum dilakukan secara masif, sementara komunikasi di tingkat RW masih terbatas pada media digital sederhana. Hal ini berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi jika tidak dikelola dengan baik. Edward III menekankan bahwa komunikasi harus dilakukan secara berulang dan konsisten agar pesan kebijakan tidak mengalami distorsi. Integrasi antara komunikasi formal dan informal menjadi penting untuk memastikan seluruh pelaku UMKM memperoleh informasi yang sama.

Efektivitas komunikasi dapat dilihat dari partisipasi aktif pelaku UMKM dalam kegiatan seperti bazar. Tanpa komunikasi yang jelas, kegiatan tersebut tidak akan berjalan lancar. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga instrumen pemberdayaan. Edward III menekankan bahwa komunikasi yang efektif memungkinkan pelaksana kebijakan memahami tujuan program dan berpartisipasi secara aktif. Pada RW 07, komunikasi berbasis komunitas berhasil menggerakkan partisipasi perempuan pelaku UMKM meskipun sosialisasi formal masih terbatas.

Dengan demikian, komunikasi menjadi faktor krusial dalam implementasi Program Kampung Kreatif Produktif di RW 07 Kelurahan Gunung Anyar. Komunikasi formal dari pemerintah kota memberikan legitimasi kebijakan, sementara komunikasi informal di tingkat RW dan PKK memperkuat koordinasi serta partisipasi masyarakat. Inisiatif lokal melalui media digital mampu menjaga konsistensi informasi dan memperkuat pemberdayaan UMKM perempuan. Komunikasi juga menjadi instrumen utama yang menjembatani kebijakan dengan realitas masyarakat sekaligus memastikan keberhasilan implementasi program.

2. Sumber Daya

Program Kampung Kreatif Produktif di RW 07 Kelurahan Gunung Anyar Kota Surabaya merupakan salah satu bentuk pemberdayaan UMKM perempuan yang bertumpu pada dukungan komunitas lokal. Dalam kerangka teori George Edward III, indikator sumber daya menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya mencakup dana, fasilitas fisik, kapasitas manusia, serta dukungan sosial yang memungkinkan kebijakan berjalan efektif. Analisis berikut menyoroti bagaimana keterbatasan maupun pemanfaatan sumber daya memengaruhi jalannya program di RW 07.

Dukungan formal dari pemerintah kota masih terbatas. Tidak adanya alokasi dana, fasilitas pelatihan berkelanjutan, maupun sarana produksi dari dinas terkait menunjukkan bahwa

program lebih banyak bergantung pada inisiatif lokal. Dalam perspektif Edward III, keterbatasan sumber daya formal dapat menjadi hambatan serius karena kebijakan sulit dijalankan tanpa dukungan material yang memadai. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan program di RW 07 lebih ditentukan oleh aktor-aktor lokal seperti RW dan PKK yang berperan sebagai penyedia alternatif sumber daya.

Fasilitas fisik hadir melalui event bazar Ramadhan dan tujuh belasan. Sarana berupa tenda, meja, lampu, dan media promosi menjadi dukungan nyata yang membantu UMKM perempuan memasarkan produk. Walaupun sifatnya temporer, keberadaan fasilitas ini menunjukkan adanya bentuk dukungan yang langsung dirasakan oleh pelaku UMKM. Dalam kerangka Edward III, sumber daya fisik yang tersedia meskipun terbatas tetap berfungsi sebagai instrumen implementasi kebijakan, karena memberikan ruang aktualisasi bagi UMKM untuk memperluas pasar.

Sumber daya sosial menjadi faktor penting yang menopang keberlangsungan program. Dukungan PKK melalui promosi di grup WhatsApp tanpa biaya, serta perhatian RW terhadap UMKM, menunjukkan bahwa jaringan sosial berperan sebagai sumber daya non-material yang signifikan. Edward III menekankan bahwa sumber daya tidak hanya berupa materi, melainkan juga dukungan moral dan jaringan komunikasi. Hal ini terbukti di RW 07, di mana solidaritas komunitas mampu menggantikan keterbatasan dana dan pelatihan formal.

Mekanisme swadaya masyarakat melalui biaya sewa meja dan kebersihan mencerminkan adanya partisipasi aktif warga dalam menutup kekurangan sumber daya finansial. Dalam perspektif Edward III, partisipasi masyarakat dapat menjadi bentuk redistribusi sumber daya yang memperkuat implementasi kebijakan. Walaupun sederhana, mekanisme ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa keberlangsungan program membutuhkan kontribusi bersama, bukan hanya bergantung pada pemerintah.

Keterbatasan pelatihan menjadi salah satu kelemahan utama dalam indikator sumber daya. Pelatihan yang jarang diadakan atau kurang diikuti oleh pelaku UMKM menghambat peningkatan kapasitas usaha. Edward III menekankan bahwa sumber daya manusia, berupa pengetahuan dan keterampilan, merupakan komponen vital dalam implementasi kebijakan. Tanpa adanya pelatihan berkelanjutan, UMKM cenderung hanya mengandalkan pengalaman pribadi, sehingga potensi pengembangan usaha tidak optimal.

RW berfungsi sebagai penghubung utama dalam mendistribusikan sumber daya. Proses pendataan kebutuhan UMKM yang kemudian disampaikan ke kelurahan dan kecamatan menunjukkan adanya peran kelembagaan lokal dalam memastikan akses terhadap sumber daya. Dalam kerangka Edward III, keberadaan aktor penghubung ini penting untuk menjembatani kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. RW menjadi institusi yang memastikan bahwa keterbatasan sumber daya dari pemerintah dapat diimbangi dengan dukungan komunitas.

Secara keseluruhan, indikator sumber daya dalam implementasi Program Kampung Kreatif Produktif di RW 07 menunjukkan adanya ketimpangan antara dukungan formal dan inisiatif lokal. Keterbatasan dana dan pelatihan dari pemerintah kota membuat program lebih bergantung pada sumber daya komunitas, baik berupa fasilitas event maupun dukungan sosial. Dalam perspektif Edward III, kondisi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kecukupan dan distribusi sumber daya. RW, PKK, dan masyarakat menjadi aktor utama yang memastikan program tetap berjalan meskipun dukungan formal minim.

3. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Menurut George Edward III, disposisi merupakan sikap, komitmen, dan karakter pelaksana

kebijakan dalam menjalankan suatu program. Disposisi menjadi faktor penting karena keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh aturan dan sumber daya, tetapi juga oleh kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut. Pelaksana yang memiliki sikap mendukung akan lebih mudah mendorong tercapainya tujuan program dibandingkan pelaksana yang tidak memiliki kepedulian terhadap kebijakan. Dalam konteks Program Kampung Kreatif Produktif di RW 07 Kelurahan Gunung Anyar, disposisi pelaksana terlihat melalui komitmen pemerintah, pengurus RW, dan PKK dalam mendukung perempuan pelaku UMKM. Sikap pelaksana tersebut dapat dilihat dari bentuk dukungan, respon terhadap kebutuhan masyarakat, serta keterlibatan aktif dalam pelaksanaan kegiatan UMKM perempuan.

Berdasarkan hasil penelitian, disposisi pelaksana dalam implementasi Program Kampung Kreatif Produktif menunjukkan adanya sikap mendukung terhadap pemberdayaan perempuan pelaku UMKM. Hal tersebut terlihat dari upaya pemerintah dan pengurus wilayah dalam memberikan fasilitas kegiatan bazar, penyebaran informasi usaha, serta koordinasi kegiatan UMKM di tingkat RW. Pemerintah melalui DP3APKB juga menunjukkan komitmen dengan melakukan sosialisasi dan membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada dinas terkait. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan pemerintah masih dinilai belum optimal oleh pelaksana di tingkat wilayah dikarenakan sering tidak tepat sasaran sehingga manfaatnya juga belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dalam pelaksanaan program masih memerlukan peningkatan agar lebih sesuai dengan kebutuhan perempuan pelaku UMKM di tingkat wilayah.

Disposisi pelaksana yang cukup baik terlihat dari adanya keterlibatan aktif dan kerja sama yang baik antara pengurus RW dan PKK dalam membantu perempuan pelaku UMKM. Pengurus wilayah tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berusaha memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat melalui kegiatan bazar dan promosi usaha. Meskipun kurangnya tingkat partisipasi karena terbatasnya waktu dan tenaga, ketua RW dan Pengurus PKK dapat dikatakan siap untuk menyediakan kegiatan pemberdayaan lain apabila terdapat permintaan dari para pelaku UMKM. Sikap tersebut menunjukkan adanya kepedulian pelaksana terhadap keberlangsungan ekonomi perempuan di lingkungan RW 07. Teori George Edward III menyatakan bahwa komitmen implementor menjadi faktor penting karena pelaksana yang memiliki kepedulian terhadap program akan lebih berupaya menjaga keberlanjutan kebijakan. Keterlibatan aktif pengurus RW dan PKK menunjukkan bahwa disposisi pelaksana memiliki pengaruh positif terhadap implementasi Program Kampung Kreatif Produktif.

Selain komitmen pelaksana, hasil penelitian juga menunjukkan adanya sikap responsif terhadap kebutuhan perempuan pelaku UMKM. Pengurus RW dan PKK berusaha menerima kebutuhan masyarakat serta membantu mengkomunikasikan kebutuhan tersebut kepada dinas terkait. Sikap responsif tersebut terlihat melalui bantuan penyebaran informasi usaha, koordinasi kegiatan bazar, dan komunikasi melalui grup WhatsApp di tingkat RT dan RW. Disposisi yang baik menurut teori Edward III ditunjukkan melalui kesediaan pelaksana dalam membantu masyarakat serta mendukung tujuan kebijakan secara nyata. Meskipun demikian, pelaksanaan program UMKM di RW 07 masih cenderung kurang beragam akibat minimnya permintaan dan partisipasi dari perempuan pelaku UMKM. Penyediaan pelatihan masih bergantung pada pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan. Pelaksana telah menunjukkan bentuk kepedulian terhadap masyarakat melalui kegiatan bazar, tetapi belum sepenuhnya aktif dalam menciptakan program pemberdayaan yang berkelanjutan.

Dari sisi penerima program, perempuan pelaku UMKM menilai bahwa pelaksana program

memiliki sikap yang cukup ramah, komunikatif, dan cepat dalam memberikan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa disposisi pelaksana mampu menciptakan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengikuti kegiatan program. Sikap komunikatif dari pelaksana juga membantu memperkuat hubungan antara pengurus wilayah dengan perempuan pelaku UMKM sehingga koordinasi kegiatan dapat berjalan lebih baik. Dalam implementasi kebijakan, hubungan yang baik antara pelaksana dan kelompok sasaran menjadi penting karena dapat meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program yang dijalankan. Oleh karena itu, disposisi pelaksana yang positif memberikan pengaruh terhadap keterlibatan perempuan pelaku UMKM dalam Program Kampung Kreatif Produktif.

Secara keseluruhan, indikator disposisi dalam implementasi Program Kampung Kreatif Produktif di RW 07 Kelurahan Gunung Anyar menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal tersebut terlihat dari adanya komitmen, kepedulian, komunikasi, dan sikap responsif pelaksana terhadap perempuan pelaku UMKM. Pengurus RW dan PKK menjadi aktor yang paling aktif dalam mendukung keberlangsungan kegiatan UMKM perempuan di lingkungan masyarakat. Akan tetapi, implementasi program masih memerlukan penguatan dukungan pemerintah dan peningkatan inisiatif pelaksana agar kegiatan pemberdayaan dapat berjalan lebih maksimal. Keberhasilan penguatan tersebut juga memerlukan dukungan dari perempuan pelaku UMKM sebagai peserta agar hasil yang diperoleh dapat lebih optimal. Dengan disposisi pelaksana yang lebih kuat dan konsisten, Program Kampung Kreatif Produktif diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pemberdayaan UMKM perempuan di Kota Surabaya.

4. Struktur Birokrasi

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III, struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi suatu program. Struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian tugas, prosedur pelaksanaan, serta koordinasi antar pelaksana kebijakan agar program dapat berjalan secara efektif dan terarah.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, struktur birokrasi dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM telah berjalan cukup baik meskipun alur birokrasi yang ada tergolong cukup panjang. Hal ini terlihat dari adanya pembagian peran yang jelas antara DP3APPKB, pihak kelurahan, pengurus RW, koordinator UMKM, hingga pelaku UMKM. Setiap pihak memiliki tugas masing-masing dalam mendukung pelaksanaan program, mulai dari penyampaian informasi, pengaturan kegiatan, hingga koordinasi pelaksanaan program di lapangan. Adanya pembagian tugas tersebut membuat arah pelaksanaan program menjadi lebih terstruktur dan terorganisir. Hasil wawancara menunjukkan bahwa koordinasi dilakukan melalui komunikasi langsung maupun melalui grup WhatsApp untuk mempermudah penyampaian informasi antar pelaksana program. Selain itu, sebelum kegiatan berlangsung para pelaku UMKM. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi telah membantu proses implementasi program agar berjalan lebih tertib, sistematis, dan mampu menjaga keteraturan antar pelaku UMKM.

Namun demikian, hambatan yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program bukan terletak pada kurangnya koordinasi, melainkan pada alur birokrasi yang masih cukup panjang. Dalam beberapa kondisi, proses penyampaian kebutuhan masyarakat harus melalui beberapa tahapan koordinasi mulai dari tingkat RW, kelurahan, kecamatan, hingga DP3APPKB maupun dinas terkait lainnya. Proses tersebut menyebabkan pemenuhan kebutuhan masyarakat terkadang membutuhkan waktu yang lebih lama. Kondisi ini juga disampaikan oleh informan bahwa birokrasi yang panjang dapat memperlambat respon terhadap kebutuhan pelaku UMKM di lapangan.

Meskipun demikian, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa DP3APPKB pada tahun ini mulai melakukan upaya perbaikan dengan menyederhanakan alur birokrasi agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan responsif. Apabila dianalisis menggunakan teori George Edward III, maka struktur birokrasi pada program pemberdayaan UMKM ini pada dasarnya telah mendukung implementasi program karena memiliki pembagian tugas dan koordinasi yang jelas. Namun, implementasi masih dipengaruhi oleh panjangnya alur birokrasi yang menyebabkan proses pelayanan menjadi kurang cepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Kampung Kreatif Produktif dalam Memberdayakan UMKM Perempuan di RW 07 Kelurahan Gunung Anyar Surabaya, dapat disimpulkan bahwa program berjalan cukup baik dengan dukungan aktif pengurus RW dan PKK, meskipun masih menghadapi kendala terutama pada aspek pendanaan, pelatihan, dan fasilitas produksi. Analisis menggunakan teori Edward III menunjukkan bahwa komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi berperan penting, dengan keberhasilan lebih banyak ditopang oleh inisiatif lokal. Program ini memberi ruang partisipasi bagi perempuan UMKM melalui bazar, koordinasi kelompok, dan komunikasi digital, namun dukungan pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan agar pemberdayaan lebih berkelanjutan.

Adapun saran yang dapat diberikan antara lain: (1) meningkatkan sosialisasi program secara lebih masif hingga tingkat RW/RT serta memanfaatkan media digital agar informasi lebih luas diterima masyarakat; (2) memperkuat dukungan sumber daya berupa pendanaan, fasilitas produksi, dan pelatihan yang sesuai kebutuhan, termasuk pendampingan pemasaran digital; dan (3) mendorong pengurus RW dan PKK lebih proaktif mengembangkan kegiatan rutin seperti pelatihan, bazar, serta kerja sama dengan pihak eksternal. Dengan penguatan komunikasi, sumber daya, dan inisiatif lokal, implementasi program diharapkan semakin efektif dalam memberdayakan UMKM perempuan secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Aji, D. S. P., Wintari, I. Y. P., & Pangestu, W. (2024). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kampunge Arek Suroboyo Ramah Perempuan Dan Anak (Kas-Rpa) Di Kota Surabaya. *Senandika: Seminar Nasional Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.
- Diansiwi, P., & Tukiman. (2025). Pemberdayaan Perempuan Melalui “ Program Kas- Rpa ” Di Lingkungan RW 05 Kelurahan Kendangsari. *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 3146–3156.
- DP3APPKB Surabaya. (2025a). *DP3APPKB*. <https://dp3appkb.surabaya.go.id/>
- DP3APPKB Surabaya. (2025b). *DP3APPKB*. <https://dp3appkb.surabaya.go.id/>
- Dwifanty, D. J., Leobisa, J. N., Bernoli, A. A., & Dima, E. T. Y. (2025). Kontribusi UMKM Terhadap Perekonomian Indonesia Serta Peluang dan Tantangan dalam Era Digitalisasi. *Akuntansi Dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global (AEPPG)*, 2(3), 71–78.
- Firmansyah, D., Maharani, R., Naufal, S., & J, M. D. F. (2025). Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Inovasi Dan Kreativitas Di Sektor UMKM. *Journal of Education and Social Sciences (JEDSOC)*, 1(3), 258–263.
- Komdigi. (2025). *Meutya Hafid: UMKM Perempuan Jadi Motor Ekonomi Digital Nasional*. Kementerian Komunikasi Dan Digital.
- Limanseto, H. (2025). *Perekonomian Indonesia Tetap Tangguh, Tumbuh 5,04% di Triwulan III-*

2025. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Rohmah, S. Z. N., & Hamidah, L. (2025). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembentukan Kampung Bebas Asap Rokok di RW 09 Kelurahan Darmo Surabaya Pendahuluan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 13(2), 192–200.
- Saleh, S. (2023). *Mengenal Penelitian Kualitatif: Panduan Bagi Peneliti Pemula*. AGMA.
- Walikota Surabaya. (2019). *Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender*. 15.